

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

**PERAN BELANJA PENDIDIKAN DAN BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL  
SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* TERHADAP HUBUNGAN RUANG FISKAL  
DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
(Studi Empiris di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018)**

**Rolanda Aisha Hidarini<sup>1</sup>, Andy Dwi Bayu Bawono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: rolandaisha@gmail.com*

<sup>2</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: andy.bawono@ums.ac.id*

**Abstract**

*This research aims to determine the influence of local government fiscal space on the Human Development Index (HDI) by using education and social protection expenditures as moderating variables. Similar studies focusing on fiscal space variables are still limited, as there are not many researches focusing on this field, especially in the literature in Indonesia. The population of this research was 503 districts/cities in Indonesia. The data in this research are acquired by using purposive sampling method, and the criteria of the research are the districts/cities that provide complete and timely financial and statistical information based on the APBD's realization report in the fiscal year 2018. Based on the above criterias, sample from 493 districts/cities were obtained for data analysis. The data used in this study are secondary data with the documentation method obtained through publication from the website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) Ministry of Finance and the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) to find out data on finance and HDI in Indonesia in 2018. The results of this study shows that fiscal space significantly influence HDI, and education expenditures has positively significant influence the relationship between fiscal space and HDI. However, social protection expenditures has negatively influence the relationship between fiscal space and HDI.*

**Keywords:** *Local Governmnet Fiscal Space, Human Development, Education and Social Protection Expenditures*

**Pendahuluan**

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang pertama kali dikembangkan oleh seorang ekonom Pakistan bernama Mahbub Ulhaq 23 tahun silam. Kini pengukuran keberhasilan kinerja suatu wilayah dalam hal pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM. Dalam pencapaian IPM tersebut dilihat dari kualitas hidup manusia yang khususnya diukur melalui tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya belinya. Serta dibangun melalui pendekatan dimensi dasar yang diukur melalui Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pendapatan.

Melalui pernyataan dalam *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1996, sebuah IPM berperan untuk mengklasifikasikan suatu negara apakah tergolong negara maju, berkembang, atau terbelakang. Karenanya, IPM di negeri ini membuat Indonesia masih menduduki posisi negara berkembang. Tingginya peluang untuk meningkatkan potensi bangsa

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

perlu didukung dengan tingginya kapabilitas dasar Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa tersebut. Sehingga untuk meningkatkan angka IPM dibutuhkan SDM sebagai modal dasar pembangunan, karena pembangunan manusia yang berkualitas menjadi tujuan akhir pencapaian setiap negara.

Di antara 17 tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang telah disepakati oleh banyak negara termasuk Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunannya, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, keempat, dan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi bagian penting dalam program pembangunan berkelanjutan (BPS, 2018).

Dalam rangka berupaya meningkatkan IPM di setiap kabupaten/kota Indonesia untuk mencapai posisi negara maju tentunya dibutuhkan sebuah anggaran. Dengan target pembangunan serta dalam mengupayakan pencapaian tujuan tersebut, kemampuan pemerintah dinilai melalui kebijakan fiskal dan ditentukan oleh ruang fiskal yang dimiliki, yaitu ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah (CALK LKPP, 2010). Sehingga perlu diketahui seberapa luas ketersediaan ruang fiskal pemerintah dalam mengalokasikan anggarannya untuk sektor yang dapat meningkatkan IPM, khususnya yang menjadi penunjang utamanya seperti pendidikan.

Kunci dari kemajuan suatu negara tidak lain adalah pembangunan, sedangkan kunci dari pembangunan itu sendiri adalah manusia yang didukung dengan pendidikan yang dimilikinya. Maka tidak akan ada kemajuan suatu negara apabila tidak ada pendidikan yang baik. Untuk sebab itu pendidikan diharuskan menjadi prioritas dalam fokus penyelenggaraan program pemerintah demi banyaknya bibit unggul yang dapat ditumbuhkan di Indonesia yang nantinya menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan.

Usaha memaksimalkan penyerapan serta pendistribusian anggaran pendidikan yang dialokasikan hinggasebesar 20% dari APBN maupun APBD sesuai UU 20 tahun 2003 mampu menjadi sarana dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan menjadikannya aset bangsa yang sesungguhnya. Melalui sebuah pendidikan, manusia dapat berproses untuk meningkatkan potensi, kreativitas, inovasi, dan hal lainnya yang berperan dalam menjadikannya investasi sumber daya di masa depan untuk mencerminkan suatu negara yang berkualitas pula. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pendidikan bermutu dan berkualitas yang didukung dengan belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap kenaikan IPM di Indonesia.

Selain pendidikan, ranah pembangunan manusia melalui sektor perlindungan sosial pun turut menjadi bahan pertimbangan. Pemerintah hadir untuk memberikan segala jenis perlindungan dari risiko-risiko mikro yang dapat mengancam masyarakat sejak di kandungan hingga usia senja, seperti risiko bayi terkena *stunting* hingga ketidakmampuan mengurus diri dan hidup sebatang kara di masa tua. Maupun risiko makro seperti bencana alam dan krisis ekonomi yang kapan saja bisa datang menyerang.

Target belanja untuk perlindungan sosial dalam APBN kian meningkat tiap tahunnya, bahkan tahun ini dialokasikan hingga 12% dari total belanja pemerintah pusat. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program-program pemerintah seperti Dana

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Indonesia Pintar, dan masih ada beberapa program lagi yang akan diinisiasi. Total anggaran yang masing-masing mencapai nominal trilyunan ini mampu mencakup jutaan warga Indonesia. Dengan adanya banyak program perlindungan sosial ini, pemerintah bermaksud untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang dapat menunjang IPM di Indonesia melalui salah satu dari komponen pengukur utamanya, yaitu keadaan ekonomi yang dilihat dari kemampuan daya belinya.

Penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap IPM sudah kerap kali dilakukan, seperti yang diteliti oleh Hayati dan Saleh (2015) dengan hasil desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap IPM di provinsi-provinsi Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelitian Zaufi *et al.* (2016), desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Riau. Menurutnya, dengan desentralisasi fiskal yang kuat belum selalu berarti dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di beberapa daerah sehingga belum dapat mencapai IPM yang tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh turunan dari desentralisasi fiskal juga telah beberapa kali dilakukan, diantaranya seperti Sari *et al.* (2016) yang menemukan hasil kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatra Utara. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pambudi (2008) dengan topik serupa namun berbeda wilayah, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Sandri *et al.* (2016) menemukan hasil dari penelitiannya bahwa ruang fiskal yang merupakan bagian dari kinerja keuangan daerah di Bali berpengaruh terhadap peningkatan IPM dengan peran alokasi belanja modal sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian di luar negeri pun turut dilakukan, seperti Imide dan Imoughele (2019) yang menyatakan bahwa variabel utang dalam negeri dan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Nigeria, sedangkan total pengeluaran pemerintah tidak. Sementara Agnello *et al.* (2017) meneliti pengaruh konsolidasi fiskal terhadap IPM dan mendapatkan hasil negatif, dimana IPM akan menurun seiring dengan terjadinya konsolidasi fiskal, terutama di negara berkembang.

Seperti yang telah sedikit dijabarkan di atas bahwasannya telah banyak penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal termasuk berbagai turunannya seperti kemandirian fiskal, kebijakan fiskal, dan konsolidasi fiskal terhadap IPM. Akan tetapi, penelitian yang melibatkan ruang fiskal yang juga merupakan bagian dari desentralisasi fiskal sebagai variabel independen masih sangat jarang ditemukan pada literatur yang tersedia, terutama di Indonesia. Dengan keterbatasan tersebut, penelitian ini menggunakan ruang fiskal sebagai variabel independen, di samping itu penelitian ini menambahkan belanja pendidikan dan belanja perlindungan sosial sebagai variabel pemoderasi. Serta memperluas jangkauan populasi menjadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Belanja Pendidikan dan Belanja Perlindungan Sosial Sebagai Variabel *Moderating* Terhadap Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Desentralisasi Fiskal**

Menurut Ahmad Abdul Haq (2015) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem NKRI. Sedangkan desentralisasi fiskal adalah penyerahan

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Maka desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih 2003: 83).

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan selama 18 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan, dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Dengan begitu maka masing-masing kabupaten/kota dapat lebih berkembang dan menunjang kenaikan IPM di Indonesia.

### **Teori Anggaran**

Anggaran menjadi fokus utama dalam akuntansi manajemen sektor publik, khususnya dalam kegiatan manajemen dengan menjadi salah satu elemen terpentingnya. Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai proses yang membentuk suatu manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dimana dari keempat proses tersebut, perencanaan memegang fungsi yang paling penting. Aktivitas perencanaan menghasilkan berbagai rencana yang di antaranya terdiri dari elemen tujuan, strategi, program, prosedur, dan anggaran (Sholihin, 2009).

Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen memiliki hubungan yang erat dengan penganggaran. Akuntansi manajemen turut berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Anggaran itu sendiri memiliki fungsi sebagai alat alokasi sumber daya publik, distribusi, dan stabilisasi.

Dengan demikian, akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Untuk mencapainya diperlukan dukungan dari manajemen SDM yang handal, atau akuntansi manajemen tidak akan menuai banyak manfaat karena pada dasarnya akuntansi manajemen hanyalah suatu alat manajemen (*management tool*) untuk perencanaan dan pengendalian (Mardiasmo, 2002). Karenanya pengalokasian belanja daerah menjadi salah satu peran akuntansi manajemen untuk memfasilitasi anggaran publik dan mampu memperluas ruang fiskal agar dapat meningkatkan IPM di Indonesia.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), IPM menjadi indikator penting suatu negara untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yaitu dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat atau penduduk. Serta dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pengukuran IPM dibentuk dari pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, pengetahuan diwakili

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan terakhir standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.

Indonesia mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 dan melakukannya secara berkala setiap tiga tahun sekali. Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah, terutama dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun. Selama kurun waktu 2010 hingga 2018, pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan perkembangan yang terus membaik, meskipun masih menyisakan beberapa tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

### **Ruang Fiskal**

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat dibagi dengan total pendapatannya (APBD TA, 2017). Sedangkan pemerintah melalui nota keuangan APBN 2014 mendefinisikan ruang fiskal sebagai ketersediaan sumber daya keuangan bagi Pemerintah untuk mendanai kebijakan melalui anggaran. Maka semakin sempit ruang fiskal yang dimiliki pemerintah, semakin lemah ruang pemerintah dalam memberikan stimulus perekonomian melalui kebijakan fiskal.

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Lontaan dan Pangerapan, 2016). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, belanja ini didapat dari semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja telah dijelaskan secara rinci dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1). Penelitian ini berfokus pada belanja pendidikan dan perlindungan sosial yang belanja daerah selenggarakan dalam hal urusan wajib.

#### **a. Belanja Pendidikan**

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD menyatakan anggaran fungsi pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemda termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. UU 20 tahun 2003 mewajibkan pengalokasian anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBD/APBN dan masih dipertahankan hingga kini demi meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan serta memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Pengalokasian di tahun 2018 ini meningkat menjadi Rp 440,9 T yang masing-masing melalui belanja pusat, transfer, dan pembiayaan.

#### **b. Belanja Perlindungan Sosial**

Target anggaran belanja perlindungan sosial kian meningkat tiap tahunnya, di tahun 2018 alokasi dari APBN sebanyak 12% menjadi Rp 283,8 T. Peningkatan ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Serta

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

untuk memperkuat program-program perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan sebagai dukungan pada masyarakat berpendapatan rendah, juga demi tercapainya bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Besarnya anggaran ini didominasi melalui subsidi sementara terkecil melalui bidik misi.

### **Pengembangan Hipotesis**

Menurut deskripsi dan analisis APBD 2011, salah satu hal dari sisi pendapatan yang dapat dilihat dalam menganalisis kesehatan keuangan APBD adalah ruang fiskal. Dengan keberadaan ruang fiskal yang merupakan sebuah rasio, dapat digambarkan berapa besar pendapatan yang masih bebas untuk digunakan oleh suatu daerah untuk mendanai program atau kegiatan yang dibutuhkannya tanpa mengganggu atau menimbulkan permasalahan pada program lain. Kemampuan daerah dalam menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien akan menciptakan sebuah ruang fiskal.

Semakin luas ketersediaan ruang fiskal yang dimiliki maka diharapkan kemampuan untuk menyelenggarakan program atau kegiatan yang bersangkutan dengan upaya menunjang IPM di daerah tersebut semakin besar. Menurut hasil temuan Sandri *et al.* (2016), belanja modal mampu memoderasi ruang fiskal dalam mempengaruhi IPM. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis pertama:

#### **H1: Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pendidikan menjadi salah satu komponen utama dalam pengukuran IPM di suatu daerah. Apabila suatu daerah memiliki pendidikan yang berkualitas maka akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas pula. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dibutuhkan sebuah dana yang telah tercantum di anggaran untuk dialokasikan secara khusus. Walaupun pendidikan telah mengantongi anggaran yang cukup besar, yaitu 20% dari APBD namun nyatanya BPS (2018) menyatakan bahwa belum mencapai target membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator pengukuran IPM seperti yang diharapkan.

Untuk itu keberadaan belanja pendidikan diharapkan mampu menjadi pemoderasi antara ketersediaan ruang fiskal yang mana memiliki peran penting untuk mendanai program dalam mendukung peningkatan IPM. Menurut penelitian Astri *et al.* (2013), tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis kedua:

#### **H2: Belanja Pendidikan memoderasi hubungan antara Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Selain pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial di suatu daerah turut menjadi komponen utama dalam menunjang IPM melalui keadaan ekonomi dengan mengukur daya belinya. Pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakatnya sejak masih di kandungan hingga di usia senja, salah satunya dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam menjalankan program untuk mendukung berjalannya perlindungan sosial ini, dibutuhkan pengalokasian khusus dari anggaran yang telah ditetapkan.

Maka diharapkan belanja perlindungan sosial dapat memperkuat ruang fiskal dalam meningkatkan IPM di suatu daerah. Menurut hasil penelitian Mailassa`adah (2017), pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

IPM. Semakin besar pengeluaran tersebut maka semakin tinggi kecepatan perkembangan IPM. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis ketiga:

**H3: Belanja Perlindungan Sosial memoderasi hubungan antara Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

### Metode Penelitian

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 503 daerah. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel penelitian berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kabupaten/kota yang berada di Indonesia.
2. Kabupaten/kota yang mempublikasikan informasi keuangan pada Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2018 secara lengkap
3. Kabupaten/kota yang memiliki data Indeks Pembangunan Manusia 2018

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel penelitian berjumlah 493 daerah.

#### Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dua website yang berbeda. Untuk data yang berkaitan dengan Laporan Realisasi APBD, diperoleh melalui publikasi dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu. Sedangkan untuk data IPM diperoleh melalui publikasi dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

#### Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua model analisis regresi, yaitu analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dengan model pertama sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 RF + \epsilon$$

Sementara analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pemoderasi memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi moderasi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis kedua dan ketiga dengan model kedua sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 RF + \beta_2 BP + \beta_3 BPS + \beta_4 RF.BP + \beta_5 RF.BPS + \epsilon$$

Keterangan: **IPM** = Indeks Pembangunan Manusia, **RF** = Ruang Fiskal, **BP** = Belanja Pendidikan, **BPS** = Belanja Perlindungan Sosial,  **$\alpha$**  = Koefisien konstanta,  **$\beta$**  = Koefisien regresi dari masing-masing variable,  **$\epsilon$**  = Koefisien *error*.

#### Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen
  - a.) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

Dalam penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia diketahui dari data yang telah dipublikasi melalui *website* Badan Pusat Statistika untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018.

### 2. Variabel Independen

#### a.) Ruang Fiskal

Dalam penelitian ini, Ruang Fiskal diketahui dari dokumen Laporan Realisasi APBD untuk Tahun Anggaran 2018 dengan memasukkannya ke dalam rumus sebagai berikut: Pendapatan Daerah – (DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian) – Belanja Pegawai

### 3. Variabel *Moderating*

#### a.) Belanja Pendidikan

Dalam penelitian ini, Belanja Pendidikan diketahui dari dokumen Laporan Realisasi APBD untuk Tahun Anggaran 2018 pada belanja berdasarkan menurut fungsinya yang telah dipublikasi melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

#### b.) Belanja Perlindungan Sosial

Dalam penelitian ini, Belanja Perlindungan Sosial diketahui dari dokumen Laporan Realisasi APBD untuk Tahun Anggaran 2018 pada belanja berdasarkan menurut fungsinya yang telah dipublikasi melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

## Hasil Penelitian

### Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 1.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	67.088	0.946		70.955	0
R_Fis	0.058	0.024	0.106	2.372	0.018

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, tabel 1.1 menunjukkan hasil dari uji analisis regresi linear berganda untuk menjawab hipotesis pertama sebagai berikut:

1. Variabel ruang fiskal memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,018 < 0,05$ . Dikarenakan nilai sig yang lebih kecil dari signifikansi level 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

**Tabel 1.2 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Persamaan 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	116.201	39.13		2.97	0.003
R_Fis	-3.555	0.915	-6.54	-3.884	0.000
LN_BPI	-6.187	1.301	-0.779	-4.755	0.000
LN_BPS	4.863	1.569	0.471	3.100	0.002
RF_BPI	0.224	0.032	10.795	6.925	0.000
RF_BPS	-0.098	0.038	-4.373	-2.553	0.011

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, tabel 1.2 menunjukkan hasil dari uji analisis regresi moderasi untuk menjawab hipotesis kedua dan ketiga sebagai berikut:

2. Variabel Ruang Fiskal yang dimoderasi oleh variabel Belanja Pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pendidikan dapat memoderasi hubungan antara Ruang Fiskal terhadap IPM.
3. Variabel Ruang Fiskal yang dimoderasi oleh variabel Belanja Perlindungan Sosial memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,011 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Perlindungan Sosial dapat memoderasi hubungan antara Ruang Fiskal terhadap IPM.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Variabel Ruang Fiskal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap IPM, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi Ruang Fiskal yang lebih kecil dari signifikansi levelnya, yaitu  $0,018 < 0,05$ . Hasil penelitian koefisien regresi yang positif yaitu senilai 0,058 menunjukkan adanya hubungan yang positif antara Ruang Fiskal dengan IPM. Jika semakin besar Ruang Fiskal yang dihadirkan pada suatu kabupaten/kota di Indonesia, maka semakin meningkat pula IPM di kabupaten/kota yang ada di Indonesia tersebut.

Hal ini dikarenakan besarnya Ruang Fiskal yang tersedia akan mempermudah pemerintah daerah dalam menggunakan celah tersebut untuk memakai dana demi kebutuhan penyelenggaraan berbagai program yang dapat meningkatkan IPM di daerahnya tanpa mengganggu program lain yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandri *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa Ruang Fiskal yang merupakan bagian dari keuangan kinerja daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan IPM dengan alokasi belanja modal sebagai variabel pemoderasi.

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

### **2. Pengaruh Belanja Pendidikan dalam memoderasi hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Variabel Belanja Pendidikan berpengaruh secara signifikan dan positif dalam moderasi hubungan antara Ruang Fiskal dengan IPM, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi Belanja Pendidikan yang lebih kecil dari signifikansi levelnya, yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian koefisien regresi yang positif yaitu senilai 0,224 menunjukkan adanya hubungan yang positif untuk Belanja Pendidikan dalam memoderasi hubungan antara Ruang Fiskal dengan IPM. Nilai signifikansi Belanja Pendidikan dalam mempengaruhi IPM yang ternyata juga lebih kecil yaitu 0,000 mengindikasikan bahwa variabel pemoderasi tersebut berperan sebagai *quasi moderator* atau pemoderasi semu, dimana jenis moderasi tersebut merupakan variabel yang selain memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen namun juga sekaligus merangkap menjadi variabel independen.

Jika semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Pendidikan pada suatu kabupaten/kota yang ada di Indonesia, maka semakin besar pula ruang fiskal yang tersedia untuk meningkatkan IPM di suatu kabupaten/kota yang ada di Indonesia tersebut. Besarnya dana yang dianggarkan untuk Belanja Pendidikan mampu memperkuat Ruang Fiskal dalam meningkatkan IPM di suatu daerah. Tingginya Belanja Pendidikan memperbesar ketersediaan suatu Ruang Fiskal, bahkan keduanya dapat berjalan secara beriringan dalam hal peningkatan angka pembangunan manusia pada suatu daerah. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang digunakan dalam pengukuran tingkat pembangunan manusia sehingga dapat menunjang tingginya IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan IPM.

### **3. Pengaruh Belanja Perlindungan Sosial dalam memoderasi hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Variabel Belanja Perlindungan Sosial berpengaruh secara signifikan dan positif dalam moderasi hubungan antara Ruang Fiskal dengan IPM, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi Belanja Perlindungan Sosial yang lebih kecil dari signifikansi levelnya, yaitu  $0,011 < 0,05$ . Hasil penelitian koefisien regresi yang negatif yaitu senilai -0.098 menunjukkan adanya hubungan yang negatif untuk Belanja Perlindungan Sosial dalam memoderasi hubungan antara Ruang Fiskal dengan IPM. Nilai signifikansi Belanja Perlindungan Sosial dalam mempengaruhi IPM yang ternyata juga lebih kecil yaitu 0,002 mengindikasikan bahwa variabel pemoderasi tersebut berperan sebagai *quasi moderator* atau pemoderasi semu.

Jika semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Perlindungan Sosial pada kabupaten/kota yang ada di Indonesia, maka justru semakin memperkecil Ruang Fiskal yang tersedia untuk meningkatkan IPM di suatu kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan program pada perlindungan sosial belum menjadi prioritas penyelenggaraan pemerintah sehingga celah yang tersedia pada Ruang Fiskal akan dialokasikan untuk kebutuhan belanja fungsi lain seperti pendidikan. Bahkan Bawono *et al.* (2017) menyatakan bahwa sesuai dengan UU tentang pemerintah daerah, belanja pemerintah difokuskan pada pelayanan dasar yang salah satunya adalah pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunartomo (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan IPM.

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

### Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Pendidikan berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Perlindungan Sosial berpengaruh negatif dalam memoderasi hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak variabel independen sehingga dapat mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data penelitian dari satu tahun anggaran saja, melainkan dari beberapa tahun anggaran dengan analisis *time series* sehingga dapat membandingkan hasilnya dari tahun ke tahun.

### Daftar Pustaka

- Agnello, Luca, et al. (2015). "The Impact of Fiscal Consolidation on Human Development". *Journal of International Development* 2017.
- Astri, Meylina et al. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.1 No. 1 Maret 2013*.
- Bawono, Andy Dwi Bayu et al. (2017). "Analisis Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa)". *ISSN: 2407-9189*.
- Haile, Fiseha dan Nino-Zarazua, Miguel. (2018). "Does Social Spending Improve Welfare in Low-Income and Middle Income Countries?". *Journal of International Development*, 30(3), 367-398.
- Harris, Elliot. (2013). "Financing Social Protection Floors: Considerations of Fiscal Space". *International Social Security Review, Vol. 66, 3-4/2013*.
- Hayati, Jurni dan Saleh, Sasumbar. (2015). "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia". *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*.
- <https://bps.go.id> diakses pada 3 Oktober 2019.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id> diakses pada 3 Oktober 2019.
- Imide, Israel Onokero dan Imoughale, Lawrence Ehikioya. (2019). "The Impact of Fiscal Policy on Human Development Index: Empirical Evidence From Nigeria's Democratic Era". *International Journal of Economics, Commerce and Management Vol. VII, Issue 2, February 2019*
- Lontaan dan Pangerapan. (2016). "Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014". *Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal 898-906. Universitas Sam ratulangi. Manado*.
- Mardiasmo. (2012). "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: ANDI.
- Mailassa`adah. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah*. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2009

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Sandri, Ni Ketut, dkk. (2016). "Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 21 No. 1 2016*.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta

Sari, Ayu Kurnia, dkk. (2017). "Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index". *International Journal of Business and Management Invention*

S. B. Pambudi. (2008). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor.

Sunartomo, Widhi. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Tesis, Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.

Solihin, Rian. (2009). *Peranan Anggaran Pengeluaran Kas Sebagai Alat Bantu dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Realisasi Pengeluaran Kas (Studi kasus pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung*. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama.

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Zaufi, Muhammad Yafiz. (2016). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau". *Jurnal Ekonomi Volume 24, Nomor 3 September 2016*.